

ABSTRAK

PUTUSAN HAKIM DIBAWAH ANCAMAN MINIMUM KHUSUS TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA DALAM LINGKUP FIDUSIA (Studi Putusan Tingkat Pertama Nomor: 31/Pid.Sus/2024/Pn Tjk)

**Oleh
Putri Muara Hutasoit**

Salah satu tindak pidana yang diatur dengan ancaman minimum khusus ialah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan dalam hal seseorang yang dengan cara apapun memberikan keterangan palsu atau tidak benar yang jika salah satu pihak mengetahui hal itu, maka tidak akan melahirkan perjanjian fidusia yang ancaman pidana penjaranya adalah paling singkat 1 (satu) tahun. Sebagaimana dalam perkara yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 31/Pid.Sus/2024/Pn.Tjk yang menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum khusus yaitu 10 (sepuluh) bulan. Sehubungan dengan hal itu permasalahan dalam skripsi ini ialah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam hal penjatuhan pidana dibawah ancaman minimum khusus terhadap perkara dalam lingkup fidusia dan melihat bagaimana perspektif kekuasaan kehakiman dalam hal penjatuhan pidana dibawah ancaman minimum khusus.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini ialah yuridis normatif. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, namun didukung dengan wawancara terhadap beberapa narasumber untuk mendapatkan penjelasan maupun informasi lebih lanjut yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada putusan tingkat pertama, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus ialah dengan berdasar pada situasi serta bobot kesalahan terdakwa. Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai bahwa putusan tersebut telah mencerminkan nilai keadilan. Namun pada perkara ini, putusan tingkat pertama diubah mengenai lama

Putri Muara Hutasoit

pidananya oleh pengadilan tingkat banding, dengan pertimbangan bahwa ketentuan minimum khusus yang telah diatur tidak dapat dikesampingkan, hal ini menyangkut kepastian hukum yang dapat mewujudkan keadilan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, disamping itu memberikan efek jera terhadap pelaku. Kekuasaan kehakiman yang pada dasarnya memiliki dua hal penting yaitu kemandirian dan kebebasan hakim, dalam hal penjatuhan pidana dibawah minimum khusus ialah bersifat kasuistis yang harus berdasarkan pada argumen yang cukup dan jelas, serta memperhatikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang harus dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional dalam memutus suatu perkara.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disarankan agar hakim dalam memutus harus berdasar pada argumen yang cukup, jelas, dan logis. Sehubungan dengan hal ini agar dapat dibentuk sebuah pedoman pelaksanaan pemidanaan dibawah penjatuhan minimum khusus. Perihal kekuasaan kehakiman, yang bertumpu pada kebebasan hakim, diharapkan agar dapat mendapat satu kesatuan pemahaman akan kebebasan dan kemandirian hakim perihal penjatuhan pidana dibawah minimal. Hal ini juga bersinggungan terkait agar segera dibentuk sebuah pedoman yang dapat menjelaskan dalam hal-hal apa saja sebuah perkara dapat dijatuhi pidana dibawah ancaman minimum khusus guna mencapai tujuan pemidanaan itu sendiri dalam hal mewujudkan keadilan disamping menyelenggarakan hukum.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Minimum Khusus, Putusan Pemidanaan.

ABSTRACT

JUDGE'S DECISION UNDER THE SPECIAL MINIMUM THREAT FOR CRIMINAL CASES WITHIN THE SCOPE OF FIDUCIARY DUTY (Study of First Level Decision Number: 31/Pid.Sus/2024/Pn Tjk)

By
Putri Muara Hutasoit

One of the criminal offenses subject to a special minimum penalty is that set forth in Article 35 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. This article states that any person who provides false or untrue information with the intention of inducing a fiduciary agreement, and who is aware that the information is false or untrue, shall be imprisoned for a period of at least one year. In a similar case, the Panel of Judges of the Tanjung Karang District Court (No. 31/Pid.Sus/2024/Pn.Tjk) imposed a sentence under the special minimum threat, which carries a minimum penalty of 10 months. In examining this issue, this thesis aims to elucidate the rationale behind the judge's decision to impose a penalty under the special minimum threat in cases pertaining to fiduciary matters and to gain insight into the judicial perspective on the imposition of penalties under the special minimum threat.

The research method used in writing this thesis is normative juridical. The data used is secondary data obtained through literature study, but supported by interviews with several sources to obtain further explanations and information related to the issues raised in this thesis. The data obtained is then analyzed qualitatively.

The results showed that in the first instance decision, the basis for the judge's consideration in imposing a sentence below the special minimum was based on the situation and the weight of the defendant's guilt. The Judges of the First Instance considered that the decision reflected the value of justice. However, in this case, the first instance decision was modified regarding the length of the sentence by the appellate court, with the consideration that the special minimum provisions that have been regulated cannot be overridden, because this concerns legal certainty that can realize legal justice and a sense of justice in society, in addition to providing a

Putri Muara Hutasoit

deterrent effect on the perpetrator. The concept of judicial power encompasses two fundamental tenets: the independence and freedom of judges. With regard to the imposition of punishment, this is a discretionary power that must be exercised based on compelling and well-founded arguments. Additionally, considerations of justice, legal certainty, and utility must be given due weight in the decision-making process.

Based on the results of the research and discussion, it is suggested that judges in making decisions must be based on sufficient, clear and logical arguments. In this regard, a guideline for the implementation of punishment under the special minimum sentence should be established. Regarding judicial power, which relies on the freedom of judges, it is hoped that there will be a unified understanding of the freedom and independence of judges regarding the imposition of punishment under the minimum. This is also related to the establishment of a guideline that can explain in what cases a case can be sentenced under a special minimum threat in order to achieve the purpose of punishment itself in terms of realizing justice in addition to administering the law.

Keywords: Fiduciary Guarantee, Special Minimum, Sentencing Decision.